

I. PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Dengan luasnya wilayah perairan yang dimiliki oleh negara Indonesia menyebabkan Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah dari kawasan laut, dan Indonesia juga memiliki keuntungan dengan memanfaatkan potensi dan keindahan laut bahari untuk menjadikan tempat-tempat wisata. Wilayah perairan di Indonesia merupakan wilayah perairan yang memiliki ekosistem yang sangat beragam.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Dengan demikian, akan dihasilkan sumber daya manusia yang handal untuk mengelola dan melindungi kekayaan sumber daya alam secara profesional. Melalui persiapan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang standar maka bangsa Indonesia akan bertahan dalam

menghadapi era kompetisi dan perdagangan bebas yang sedang terjadi saat ini (Nommy Horas Thombang Siahaan, 2008: 16).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antara sektor pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya pelestarian dan perlindungan ekosistem laut di pesisir.

Aset dan potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan Indonesia yang luar biasa diperlukan pengelolaan yang profesional dan kredibel yang dilakukan oleh instansi yang menangani kelautan dan perikanan. Karena itu, untuk mengelola sumber daya alam tersebut diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan paham akan tugasnya. Guna mendorong dan mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten tersebut harus dipersiapkan dan dirancang secara sistematis antara lain dalam sistem diklat dan perangkat-perangkat pendukungnya.

Laut yang ada merupakan suatu ekosistem yang kaya dengan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan juga untuk kesejahteraan manusia. Sebagaimana diketahui bahwa 70% permukaan bumi ditutupi oleh perairan dan lebih dari 90% kehidupan bio massa yang hidup di laut. Oleh karena itu, lautan merupakan bagian penting bagi kehidupan manusia. Sebagian besar wilayah Indonesia yang wilayahnya terdiri dari perairan laut memiliki letak yang

sangat strategis. Perairan laut di Indonesia selain dimanfaatkan sebagai sarana penghubung lokal maupun internasional juga memiliki sumber daya laut yang sangat kaya dan penting antar lain sumber daya perikanan, terumbu karang, mangrove, bahan tambang, dan daerah pesisirnya dapat dimanfaatkan sebagai obyek wisata yang menarik.

Masalah kelestarian ekosistem pesisir laut merupakan salah satu masalah lingkungan yang serius. Ekosistem hutan mangrove yang sudah dieksploitasi oleh aktivitas ekonomi penduduk biasanya tidak dilakukan upaya pelestariannya sehingga ekosistem hutan mangrove akan terus-menerus mengalami kerusakan dan akhirnya menjadi punah. Hal ini dapat dilihat dari berkurangnya keragaman hayati laut dan penurunan daya dukung ekosistem laut dan pesisir, seperti kerusakan terumbu karang di wilayah pesisir kepulauan yang saat ini mencapai 23,08%.

Dengan adanya kerusakan terumbu karang tersebut, diupayakan agar kerusakan yang lebih parah lagi dapat dicegah. Untuk ekosistem hutan mangrove yang mengalami kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi penduduk perlu dilakukan upaya pelestarian ekosistem hutan mangrove oleh pemerintah dan masyarakat dengan konservasi, reboisasi dan rehabilitasi hutan mangrove. Upaya pelestarian ekosistem hutan mangrove yang dilakukan oleh pemerintah biasanya dilakukan oleh Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun dari pemerintah daerah setempat kemudian dibantu oleh masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan alam.

Di Indonesia, dikenal instansi yang menangani tentang ekosistem dan hasil laut yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan. Instansi pemerintah ini yang menangani permasalahan tentang pelestarian ekosistem laut dan budi daya hasil laut yang hampir punah. Adapun salah satu fungsi DKP yang diatur dalam Pasal 300 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 adalah:

- a. melakukan pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan; pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan;
- b. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- c. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Dinas kelautan dan Perikanan untuk menjalankan fungsi tersebut, memiliki peran mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dengan cara mengembangkan budi daya dan pelestarian ekosistem laut yang tentunya sangat perlu mendapatkan perhatian. Pengembangan produksi perikanan, pemanfaatan potensi perikanan ,serta produksi terumbu karang dan tanaman laut yang masih belum mampu digarap secara optimal, pembinaan dan juga pengawasan mutu serta pemasaran hasil-hasil laut dan pengembangan agro bisnis secara efisien dan terpadu.

Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan ekosistem laut. Dinas Kelautan dan Perikanan dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat pesisir pantai yang sebagian besar mata

pencahariannya sebagai nelayan untuk tidak menangkap ikan dengan putas ataupun bom ikan. Dinas Kelautan dan Perikanan juga bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat pesisir bagaimana cara untuk melakukan budi daya. Dinas Kelautan dan Perikanan juga mempunyai tugas untuk budi daya ikan-ikan laut dan terumbu karang yang sudah hampir punah. Tujuan dari budi daya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan adalah untuk memperpanjang kelangsungan makhluk hidup yang ada, karena hasil budi daya yang dilakukan akan langsung dikembalikan ke habitat awalnya, yaitu di perairan laut.

Meskipun sudah dilakukan sosialisasi betapa penting dan berharganya menjaga ekosistem laut, tetapi masih ada saja oknum yang tidak memperdulikan hal tersebut dan tetap saja melakukan pengrusakan terhadap ekosistem laut yang ada. Oleh karena itu, Dinas Kelautan dan Perikanan harus berusaha dan mencari tahu faktor apa yang telah menyebabkan semakin parahny kerusakan yang di alami oleh ekosistem laut yang telah disebabkan oleh manusia. Dinas Kelautan dan Perikanan juga harus segera mencari cara dan berusaha untuk menjaga ekosistem laut yang sudah rusak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti permasalahan ini sebagai penelitian karya ilmiah dengan judul: “Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Terhadap Pelestarian Ekosistem di Pesisir dan Laut”.

1. 2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. 2. 1 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang, permasalahan dalam tulisan ini adalah:

- a. Bagaimanakah peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung terhadap pelestarian ekosistem di pesisir laut?
- b. Apakah faktor penghambat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung terhadap pelestarian ekosistem di pesisir laut?
- c. Apakah Upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam pelestarian ekosistem di pesisir laut?

1. 2. 2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian di bidang Hukum Administrasi Negara tentang Peran Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap pelestarian ekosistem di pesisir laut.

1. 3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. 3. 1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini, adalah:

- a. Mengetahui dan menganalisis peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung terhadap pelestarian ekosistem di pesisir laut.
- b. Mengetahui faktor penghambat peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam pelestarian ekosistem di pesisir laut.

- c. Mengetahui dan menganalisis upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam melestarikan ekosistem di pesisir laut.

1. 3. 2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini, yaitu:

- a. Kegunaan teoritis, yaitu memperluas dan memperdalam ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung terhadap pelestarian ekosistem di pesisir laut.
- b. Kegunaan praktis, yaitu menambah pengetahuan masyarakat dan pelaku dunia usaha serta sebagai sumber informasi bagi para pengaji ilmu hukum ataupun rekan-rekan mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama.